

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

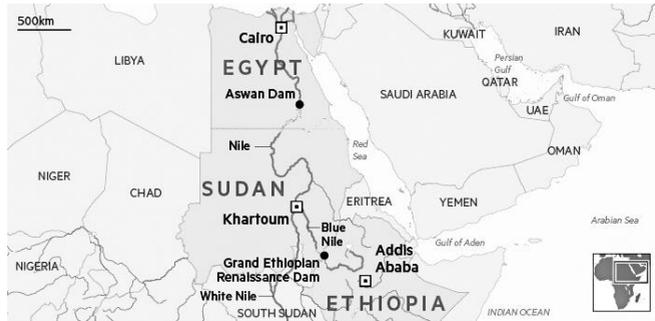
Mesir merupakan salah satu negara yang memiliki kawasan geografis yang beriklim sub-tropis kering dan panas, hal inilah yang memicu sumber daya alam khususnya air sangat diperhitungkan di negara ini. Dengan populasi yang terus meningkat maka kebutuhan akan sumber daya air juga akan terus meningkat. Sungai Nil merupakan satu-satunya sumber daya air yang paling dimanfaatkan oleh Mesir. Sungai Nil memiliki arti penting bagi Mesir karena sungai Nil merupakan sumber utama bagi kehidupan rakyat Mesir untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, irigasi pertanian, kebutuhan industri, PLTA melalui bendungan Aswan dan sebagai alat transportasi (Aznor, 2016, pp. 39-42).

Peranan Mesir sangat penting atas hegemoninya dalam mengelola air Sungai Nil. Dalam sejarahnya, perjanjian historis telah dilakukan Mesir dan Inggris pada tahun 1929 setelah mengambil kemerdekaan dari Inggris dan digunakan sebagai payung hukum bagi Mesir untuk penggunaan air Sungai Nil, isi penting perjanjiannya yaitu menjamin bahwa tidak akan ada proyek pekerjaan di sepanjang sungai nil yang mempengaruhi kepentingan Mesir dan bagi negara yang akan membangun bendungan di Sungai Nil harus terlebih dahulu izin pada Mesir (Lumumba, 2007, p. 13).

Namun, setelah Sudan merdeka pada tahun 1952, Sudan kemudian memprotes karena perjanjian tersebut terlalu menguntungkan Mesir. Akhirnya, pada tahun 1959 Sudan dan Mesir menyepakati perjanjian baru antara keduanya dalam pembagian hak air di Sungai Nil. Ada sekitar 55,5 milyar kubik yang diperoleh Mesir dan 18,5 miliar kubik atas debit air Sungai Nil pada perjanjian tersebut. Sehingga membuat Mesir dan Sudan memegang hegomoni atas Sungai Nil (Aznor, 2016, p. 35). Sungai Nil memiliki anak sungai utama yaitu Nil Biru, Nil Putih dan Atbara. Dilihat dari geografisnya, Sungai Nil mengalir dari selatan ke utara melewati Tanzania, Rwanda,

Burundi, Uganda, Kenya, Kongo, Ethiopia, Sudan, Sudan Selatan, Eritrea dan Mesir (Tandirerung, 2014, p. 640).

Gambar 1. 1 Peta Sungai Nil dan bendungan GERD



Sumber: (Saleh, 2017)

Negara-negara di hulu Sungai Nil memiliki sebuah organisasi kemitraan antar negara yang bernama *Nile Basin Initiative* (NBI) pada tahun 1999 yang bertujuan untuk mengembangkan pengelolaan Sungai yang lebih bermanfaat untuk sosial dan ekonomi secara kooperatif. Dimana ada 10 negara anggotanya terutama Negara-negara hulu sungai Nil yang menjadi inisiator organisasi kerjasama ini yaitu Mesir, Ethiopia, Kenya, Kongo, Rwanda, Burundi, Tanzania, Sudan, Sudan Selatan dan Uganda (International Waters Governance, 2013).

Pada tahun 2010 melalui kerjasama *Nile Basin Initiative* telah menghasilkan sebuah kesepakatan berupa *Nile Basin Initiative Cooperative Framework Agreement* (CFA) yang telah ditandatangani oleh 6 negara yaitu (Ethiopia, Tanzania, Uganda, Rwanda, Kenya dan Burundi). CFA dibuat untuk menggantikan perjanjian Mesir dan Inggris yang bertujuan untuk membuat instrumen hukum yang komprehensif dalam menggunakan seluruh aliran di Sungai Nil secara adil. Namun, Mesir menolak untuk meratifikasi perjanjian CFA tersebut dengan alasan kesepakatan perjanjian ini merugikan pihak Mesir karena CFA berpotensi melawan hegemoni Mesir atas

Sungai Nil dengan tidak menganggap perjanjian historis Mesir atas hak istimewanya terhadap Sungai Nil. Pada akhirnya CFA memberikan legitimasi pada proyek pembangunan di lembah Sungai Nil sehingga dimanfaatkan oleh Ethiopia untuk membangun sebuah bendungan yang Mesir akhirnya tidak memiliki hak veto lagi atas pembangunan proyek di Sungai Nil sehingga Mesir harus mempertahankan air di Sungai Nil dengan cara yang lain (Aznor, 2016, p. 10).

Konflik terjadi pada April tahun 2011 ketika Ethiopia membangun sebuah bendungan yang diberi nama *Grand Ethiopian Renaissance Dam* (GERD) yang diharapkan sebagai PLTA terbesar di Afrika saat ini yang berlokasi di Nil Biru yaitu salah satu anak utama dari Sungai Nil yang akan dibangun setinggi 145 m. Ethiopia membangun bendungan tersebut untuk meningkatkan pasokan tenaga listrik yaitu mencapai 6.000 megawatt dan menyimpan 74 m³ untuk kepentingan domestik serta mendorong pergerakan dalam bidang industrialisasi (Gebreluel, 2014, p. 25).

Ethiopia menjanjikan 83% daya listrik untuk penduduk yang tidak memiliki akses listrik (Michel, 2013). Proyek pembangunan bendungan tersebut mencapai \$ 4,8 miliar dan diperkirakan memakan waktu mencapai 6 tahun. Akibat dari pembangunan bendungan ini hubungan antar Mesir dan Ethiopia merenggang dikarenakan Sungai Nil merupakan sumber utama bagi kehidupan rakyat Mesir. Pada saat dibangunnya bendungan GERD itu presiden yang memimpin Mesir adalah Muhammad Mursi yang menolak dibangunnya bendungan tersebut. Mursi menilai bahwa pembangunan GERD akan mengancam hak-hak yang diberikan Tuhan kepada Mesir Selain itu, ancaman militer juga dibuat pada masa kepresidenan Mursi. Diantaranya yaitu pengusiran secara paksa suku Oromo Ethiopia dari Mesir. Presiden Mursi sangat menjaga sekali keberadaan Sungai Nil agar tidak diganggu oleh negara lain (Genindy, 2018).

Berbeda dengan masa kepresidenan Abdul Fattah As-Sisi yang lebih mengedepankan hubungan diplomasi dan kerjasama

untuk merespon pembangunan bendungan tersebut karena lebih melihat adanya peluang hubungan timbal balik keuntungan dengan adanya pembangunan GERD ini. Melalui perwakilan menteri luar negeri Mesir, Sameh Shoukry mengusulkan untuk melibatkan *World Bank* sebagai pihak netral dalam mengatasi kasus ini (Saleh, 2017).

Alasan utama penolakan pembangunan bendungan GERD ini dikarenakan adanya kepemilikan hegemoni Mesir dan Sudan dalam mengendalikan sungai Nil pada perjanjian historis dengan Inggris yang membuat jaminan dan ketersediaan air tetap terjaga. Namun, ada upaya CFA dan negara *Nile Basin* untuk melawan kehegemonian Mesir di Sungai Nil. Adapula kekhawatiran pemerintah adalah akan mengurangi debit air yang akan mengalir ke Sungai Nil dan akan berpotensi melumpuhkan sektor pertanian dan industri di Mesir. Yang mana Sektor pertanian merupakan sektor unggulan Mesir. Hampir 80% kegiatan pertanian menggunakan ketersediaan air dari sungai Nil. Adapun sektor industri yang digeluti oleh masyarakat Mesir adalah pembuatan bahan tekstil linen dan budidaya tanaman rami untuk pembuatan minyak. Sedangkan di sektor pertanian adalah pertanian bawang merah, bawang putih, kapas, padi, kentang, kol, buncis, dan terong (Jatnika, 2008).

Oleh karena itu, Mesir dalam hal ini harus mengambil tindakan terkait pembangunan GERD ini dengan tidak menggunakan cara agresif militer seperti masa Mursi, karena hal itu tidak akan berpengaruh terhadap pembangunan bendungan ini dan akan merusak hubungan kedua negara. Maka, Mesir menggunakan cara yang *Soft Power* seperti diplomasi dan mediasi yang telah dilakukan oleh masa As-sisi. Salah satunya yang dilakukan oleh As-Sisi adalah berkunjung ke Ethiopia dan bertemu langsung dengan Presiden Ethiopia.

Perubahan sikap dan respon Mesir dalam menanggapi GERD ini tidak dapat disebut sebagai sikap “menerima apa adanya” dari Mesir terkait pembangunan GERD. Mesir memiliki pertimbangan *win-win solution*. Mesir melihat celah

bahwa pembangunan GERD dapat memberikan keuntungan jangka panjang bagi Mesir. Selain daripada itu, Presiden As-Sisi yang tentu menganggap dirinya sebagai pemimpin yang akan memperbaiki kondisi Mesir yang dianggap buruh di bawah kepemimpinan Presiden Mursi sebagai pendahulunya, juga menjadi faktor yang berkontribusi bagi perubahan respon tersebut.

Tabel 1. 1 Perbedaan Strategi Mursi dan As-Sisi dalam Merespon Pembangunan GERD

Indikator	Presiden Mursi (2012-2013)	Presiden As-Sisi (2013-Sekarang)
Sikap terhadap Perjanjian	Menolak <i>Cooperative Framework Agreement</i>	Menyepakati <i>Declaration of Principle</i> yang berisi pengaturan pembangunan negara-negara <i>Nil Basin</i> .
Penggunaan air sungai Nil	Tidak membiarkan negara lain menggunakan air sungai Nil.	Menyepakati <i>Declaration of Principle</i> yang berisi pengaturan pembangunan negara-negara <i>Nil Basin</i> .
Sikap Merespon Pembangunan GERD	<ul style="list-style-type: none"> • Kampanye diplomatik dengan negara-negara Eropa dan pihak donor. • Mengajak komunitas internasional menolak pembangunan GERD. • Menemui perusahaan konstruksi GERD di Italia untuk menjelaskan situasi air di Mesir. 	<ul style="list-style-type: none"> • Presiden As-Sisi mengunjungi Ethiopia pada tahun 2015 untuk bertemu presiden Ethiopia. • Pemerintah Mesir meyakini bahwa pembangunan GERD tidak akan mengancam keamanan air di Mesir. • Presiden As-Sisi meyakini bahwa pembangunan GERD dapat memperhatikan kesejahteraan masyarakat Mesir.
Sikap politik dan kebijakan luar negeri	<ul style="list-style-type: none"> • Pengusiran suku Aromo (Ethiopia) dari Mesir. • Mengeluarkan ancaman pengerahan pasukan militer. 	<ul style="list-style-type: none"> • Presiden As-Sisi ingin membuka hubungan baik kembali dengan Ethiopia. • Presiden As-Sisi memiliki keinginan untuk memperkuat hubungan yang akomodatif dari kedua negara. • Mesir dan Ethiopia mau membahas kembali hubungan perdagangan antarkedua negara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka diajukan rumusan masalah sebagai berikut: **“Apa faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan strategi Mesir untuk merespon pembangunan *Grand Ethiopian Renaissance Dam* (GERD) pada tahun 2012-2018?”**

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan strategi Mesir untuk merespon pembangunan *Grand Ethiopian Renaissance Dam* (GERD) pada tahun 2012-2018.

D. Literatur Review

Muhammadi Faruki (2016) melakukan penelitian dengan judul *Perubahan Respon Mesir Terhadap Pembangunan Grand Ethiopian Renaissance Dam di Sungai Nil Biru Tahun 2015*. Pembahasan pada penelitian ini menitikberatkan pada perubahan kebijakan luar negeri Mesir terhadap pembangunan bendungan oleh Ethiopia Di Sungai Nil Biru.

Persamaan yang substansial dengan penelitian ini adalah terletak pada variabel perubahan kebijakan Mesir dalam merespon pembangunan GERD. Sedangkan perbedaannya terletak pada teori yang digunakan dan periode penelitian yang mana penelitian mengambil tahun 2012-2018.

E. Kerangka Pemikiran

1. Teori Politik Luar Negeri *Decision Making Process* William D. Coplin

Kepentingan-kepentingan negara yang sekiranya tercapai akan berpengaruh terhadap eksistensi suatu negara. Kepentingan-kepentingan negara tersebut tidak hanya dapat dipenuhi dalam satu lingkup domestik saja, melainkan melalui kerangka hubungan antar negara. Adapun ide kepentingan nasional mengacu pada perangkat yang ideal dari tujuan-tujuan

nasional yang harus ditemukan sebagai dasar dari hubungan luar negeri suatu negara (Seabury, 1963 : 86).

Kepentingan nasional merupakan sebuah pedoman dasar untuk memutuskan suatu kebijakan serta merupakan tolak ukur dalam upaya menentukan tindakan yang akan diambil oleh suatu pemerintahan baik nasional maupun internasional. Dasar dari terbentuknya kebijakan luar negeri adalah konsep kepentingan yang sebagaimana dalam masalah ini digunakan oleh Mesir untuk menjelaskan apa yang menjadi faktor tindakan perubahan kebijakan dalam merespon pembangunan bendungan tersebut. Apakah hal tersebut merupakan faktor ekonomi, sosial atau politik?.

Kebijakan luar negeri suatu negara pada umumnya merupakan hasil dari serangkaian keputusan yang berkaitan dengan fenomena antar bangsa. Kebijakan tersebut dikeluarkan oleh negara tertentu untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dengan negara lain. Dalam tulisan ini untuk menjelaskan tentang suatu negara pasti akan memutuskan kebijakan luar negerinya berdasarkan dengan apa yang menjadi kepentingan nasionalnya. Ada beberapa aspek yang perlu dipahami terlebih dahulu sebelum memahami cara pengambilan keputusan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap sebuah isu. William D. Coplin menggunakan analisis pendekatan rasionalitas dalam bukunya yang berjudul, *Introduction to International Politics* Pendekatan rasionalitas menekankan bahwa negara merupakan aktor untuk mencapai tujuan nasional. Untuk mencapai tujuan nasional itu mereka lakukan dengan mengkalkulasikan secara rasional aspek dalam kancah politik global.

Teori pengambilan keputusan yang di kemukakan oleh William D. Coplin yang menyatakan :

“To be interested in why states behave as they do interest area, We have to be interested in why their leaders make the decision. However, it would be mistake to think that foreign policy makers act in vacuum. On the contrary, any given foreign policy act may be view as the result of

three board catagories od consideration affecting the foreign policy decision makers state. The first is domestic politics within the doreign policy decision makes states. The second is economy and military capability of thr state. The third is the international contex the particular position in which his state finds it self specially in relation to other state in system”(William, 1974)

Pendekatan ini mencoba menganalisis tiap respon apa saja yang akan dilakukan sebagai bentuk dari perhitungan yang rasional. Dalam kata lain, Pendekatan ini menerangkan politik luar negeri yang dilakukan oleh sebuah negara merupakan respon terhadap apa yang dilakukan oleh negara lain. Pendekatan ini disebut rasional karena akan menghitung atau menganalisis dari alternatif-alternatif yang ada, mana alternatif yang paling baik dan paling tidak baik untuk dijadikan tindakan respon dalam politik luar negeri. Menurut Coplin, untuk dapat memahami mengapa suatu negara berperilaku sejalan dengan wilayah kepentingan mereka, dan harus memahami juga mengapa atau apa yang melatarbelakangi para pemimpin membuat keputusan. Namun, ini akan menjadi kesalahan jika menganggap bahwa para pembuat kebijakan luar negeri bertindak dalam suatu keadaan yang *vacum*. Sebaliknya, setiap kebijakan luar negeri yang diberikan dapat dilihat sebagai hasil dari tiga kategori pertimbangan yang mempengaruhi kebijakan luar negeri negara negara pengambil keputusan. Pertama adalah politik dalam negeri dalam kebijakan negara-negara pengambil keputusan. Kedua adalah kemampuan ekonomi dan militer negara. Ketiga adalah konteks internasional, posisi tertentu di mana negara itu menemukan jati dirinya, khususnya mengenai hubungannya dengan negara lain dalam suatu sistem (Coplin W.D.,2003 ,p.74).

William D. Coplin dalam bukunya juga mengutarakan sebuah skema terkait yang di populerkannya ini. Skema tersebut bertujuan untuk memudahkan memahami perjalanan pengambilan kebijakan luar negeri dan juga untuk menjelaskan bagaimana ketiga konsideran yang telah disebutkan di atas

saling berinteraksi hingga diambilnya sebuah kebijakan luar negeri oleh sebuah negara. Adapun skema teori yang dikemukakan oleh William D. Coplin adalah sebagai berikut.

Gambar 1. 2 Skema teori pengambilan Kebijakan Luar Negeri William D. Coplin



Sumber: William D. Coplin dan Marsedes Marbun, Pengantar Politik Internasional : Suatu Telaah Teoritis, (edisi kedua, tahun 2003).

Politik Domestik (Politik Dalam Negeri)

Politik dalam negeri suatu negara jelas dapat membawa dampak besar bagi pengambilan atau ditetapkannya politik luar negeri suatu Negara. sistem pemerintahan suatu negara merupakan kondisi dalam negeri yang sangat dipertimbangkan dalam membuat suatu keputusan. Stabilitas suatu negara juga ikut menjadi faktor penting dalam mempertimbangkan pengambilan sebuah keputusan agar menghasilkan keputusan yang tepat (Coplin W. D., 2003, p. 170).

Terkait dengan kondisi politik dalam negeri di Mesir, perubahan strategi Mesir dalam merespon pembangunan GERD disebabkan oleh perubahan kondisi politik dalam negeri, yang dalam hal ini adalah pergantian rezim dari Presiden Mursi ke Presiden As-Sisi pada tahun 2013. Pergantian pemimpin ini

menyebabkan pergeseran kebijakan luar negeri Mesir. Terkait perubahan kebijakan, setiap pemimpin memiliki gaya memimpin jika berdasarkan pada konsep *personality perceptions* atau faktor lain yang melekat pada mereka. *Personality* menjelaskan adanya hubungan aktif-pasif dan positif-negatif dalam kepribadian politik (Hanzel, 2003).

Sejalan dengan pergantian rezim, maka berubah pula cara yang digunakan untuk mengambil keputusan dan kebijakan. Mursi lebih diidentikan dengan pemimpin yang pasif yang bersifat reaktor yang mana sebagai individu yang memunculkan reaksi dari negara lain. Sedangkan As-Sisi termasuk pemimpin aktif yang bersifat inovator yang cenderung menggunakan strategi baru dalam merespon masalah GERD, yakni mengadakan kerjasama dalam kerangka *Declaration of Principle*. Karena, negara-negara yang dipimpin oleh seorang Presiden, Perdana Menteri ataupun seorang Raja bisa disebut sebagai aktor yang paling berpengaruh dalam setiap pengambilan keputusan suatu negara (Coplin W. D., 2003, p. 74)

Keadaan Ekonomi dan Militer

Para pengambil keputusan atau *decision maker* haruslah mempertimbangkan dengan sangat matang bagaimana kondisi ekonomi dan militer negaranya dalam merumuskan dan membuat kebijakan luar Negeri. Penting bagi para pembuat keputusan untuk mengetahui dan menakar kekuatan dan juga kelemahan ekonomi dan militer negaranya jika hendak merumuskan sebuah politik luar negeri (Coplin W. D., 2003, p. 124).

Terkait dengan situasi ekonomi pada saat presiden As-sisi sangat stabil dibanding saat As-sisi menjabat di militer. Kepentingan ekonomi Mesir semakin menguat terhadap Ethiopia. Hubungan antara Mesir dan Ethiopia adalah saling ketergantungan, yang mana ketergantungan tersebut membuat kedua negara saling bekerjasama untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ketergantungan itu tampak pada kelebihan Mesir dalam sektor pertanian yang kuat. Potensi tersebut dapat ditawarkan kepada Ethiopia mengenai investasi pertanian dengan catatan

Mesir mendapatkan bagian yang besar dalam bendungan tersebut (The american university Cairo , 2015).

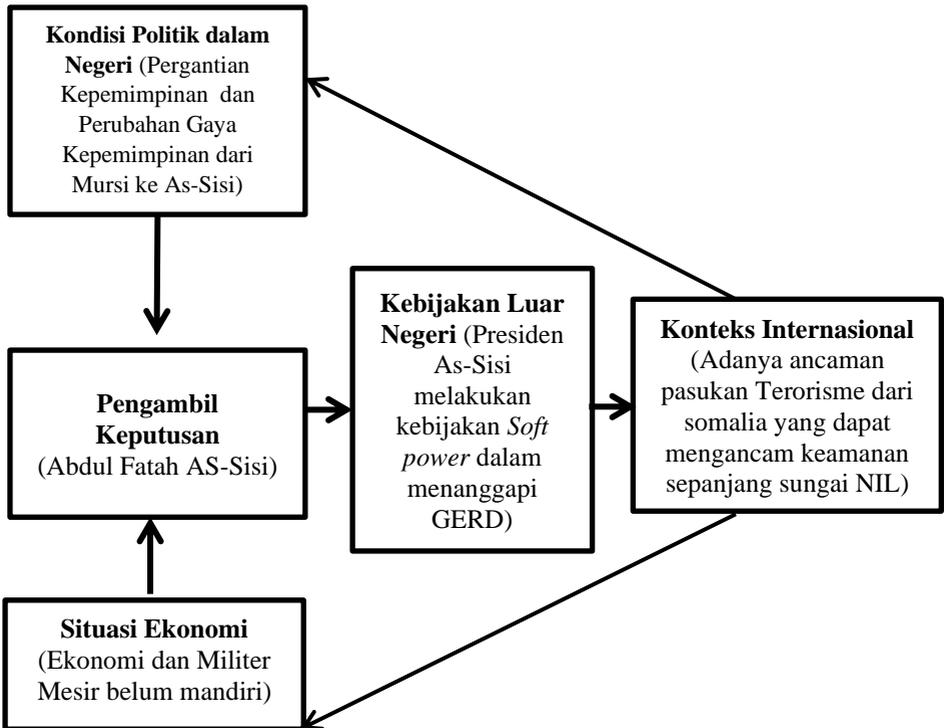
Para analisis mengatakan bahwa karakteristik utama kekuasaan Al Asisi yaitu peningkatan aspek keamanan situasi militer, Presiden As-Sisi mengeluarkan kebijakan untuk menempuh *softpower* dibandingkan *hardpower* yang digunakan oleh Presiden Mursi. Keputusan ini secara langsung merupakan asumsinya mengenai kegagalan yang dilakukan oleh Mursi. Pada saat kepemimpinan Mursi, Ethiopia dianggap sebagai musuh yang harus dimusnahkan (Faruki, 2016).

2. Konteks Internasional

Konteks internasional adalah situasi dimana Negara yang menjadi tujuan politik luar Negeri, serta pengaruh dari Negara-Negara lain yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi merupakan konsideran dalam membuat keputusan luar Negeri. Ada yang disebut tiga faktor penting ketika hendak berbicara tentang dampak yang dihasilkan dari sebuah konteks internasional terhadap kebijakan luar negeri suatu negara yakni kondisi geografis, kondisi ekonomis dan kondisi politis. Dalam hal ini, ranah permainan internasional setiap Negara berdiri diatas lokasi yang sedang dipijak olehnya, keterkaitannya dengan Negara-negara lain dalam sistem tersebut serta hubungan-hubungan ekonomi dan politik yang terjalin antara Negara satu dengan yang lainnya. Aliansi-aliansi juga bisa berdampak besar terhadap anggotanya dan bukan anggotanya. Terutama apabila aliansi itu menyangkut pasukan-pasukan yang berada di wilayah asing (Coplin W. D., 2003, p. 166).Mesir dalam hal ini menganggap bahwasanya adanya tekanan dari internasional yaitu datangnya pasukan terorisme dari Somalia ini dapat mengancam stabilitas keamanan di sepanjang Sungai Nil.

Berikut adalah aplikasi teori pengambilan keputusan kebijakan luar negeri William D. Coplin dalam respon terhadap pembangunan GERD oleh Mesir:

**Gambar 1. 3 Aplikasi Teori Pengambilan Keputusan
Kebijakan Luar Negeri William D. Coplin**



F. Hipotesa

Berdasarkan Penjelasan latar belakang, rumusan masalah diatas, maka hipotesa dalam penelitian ini adalah :

1. Perubahan strategi Mesir dalam merespon pembangunan *Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD)* disebabkan oleh perbedaan karakter gaya kepemimpinan pada masa Pemerintahan Mursi dan Pemerintahan As- Asisi.
2. Perubahan strategi Mesir dalam merespon pembangunan *Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD)* juga

disebabkan oleh kondisi ekonomi dan militer mesir yang belum mandiri sehingga membutuhkan kerjasama dengan negara lain termasuk Ethiopia.

3. Dilihat dari konteks internasioal, Mesir membutuhkan Ethiopia untuk bekerjasama megusir pasukan terorisme yang dapat mengancam keamanan disepanjang sungai Nill.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan pengetahuan yang mengkaji ketentuan mengenai metode-metode yang digunakan dalam penelitian. Selain itu, metode penelitian dilakukan untuk memecahkan masalah penelitian secara sistematis (Bakry, 2016, hal. 8).

Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan metode penelitian kualitatif menggunakan study pustaka. Teknis study pustaka ini menggunakan bahan bacaan tertulis seperti buku, jurnal, dokumen dan berita serta beberapa penelitian yang berhubungan dengan masalah penelitian. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mencari penelitian yang mendalam tentang suatu fakta atau realita dari suatu masalah yang dapat dipahami apabila ditelusuri secara mendalam (Dr.J.R.Raco, 2010, hal. 1-2).

Metode ini dilakukan dengan memeriksa sebab-sebab dari suatu reaksi tertentu dengan tujuan untuk menggambarkan sifat terkait sesuatu yang berlangsung. Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan fakta sebagai dari objek penelitian. Data yang sudah didapat akan dikumpulkan dan dianalisis untuk dijadikan gambaran mengenai keadaan yang sedang diteliti.

2. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini, subjek yang akan dibahas dalam penelitian adalah Mesir dalam menanggapi pembangunan bendungan GERD di Sungai Nil pada

tahun 2011-2018 dilihat dari kebijakan-kebijakan yang dibuatnya. Serta melihat perspektif Mesir dalam menanggapi pembangunan bendungan tersebut yang mempunyai tujuan tertentu.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan diambil dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik studi pustaka dari beberapa literatur yang diambil dan berbagai jenis penelitian seperti buku, jurnal, laporan, dokumen dan beberapa berita terkait yang dapat membantu menjawab penelitian ini dengan akurat.

4. Proses Penelitian

Metode analisis data yang digunakan dalam menganalisis data hasil penelitian adalah teknik analisis data deskriptif. Format penelitian yang menggunakan teknik analisis kualitatif biasanya adalah format studi kasus terhadap individu maupun kelompok. Analisis data kualitatif berfokus pada penempatan data, deskripsi data pada konteks masalah yang terkait dengan lebih penulisan di dalam kata dari pada angka (Nawawi, 2001). Analisis dilakukan oleh beberapa tahapan, pertama penulis mencari data-data yang valid dan dikumpulkan di dalam beberapa literature untuk dijadikan referensi sehingga membuktikan penelitian. Kedua, data yang ada akan dikelompokkan dalam kategori tahun untuk memudahkan penelitian. Ketiga, menganalisis data yang ada untuk dijadikan hasil penelitian yang kongkrit.

H. Jangkauan Penelitian

Jangkauan utama dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan strategi Mesir untuk merespon pembangunan *Grand Ethiopian Renaissance Dam* (GERD) pada tahun 2012-2018.

Penelitian ini bermula pada tahun 2012 sampai 2018 dimana pada tahun 2012 merupakan tahun pertama proyek

pembangunan bendungan GERD ini dimulai dan akan diakhiri penelitian ini pada tahun 2018 sebagai akhir dari pengambilan data diakses.

I. Sistematika Penelitian

BAB I Pendahuluan

Pada Bab ini akan diuraikan latar belakang masalah serta indikator dari permasalahan itu timbul yang kemudian akan dirumuskan dalam sebuah rumusan masalah. Pada bab ini penulis juga akan memaparkan kerangka pemikiran untuk menjelaskan alat analisis apa yang digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya dalam bab ini juga tercantum tujuan penelitian, metode penelitian, batasan penelitian serta sistematika penulisan yang akan digunakan selama proses penelitian.

BAB II Pembangunan *Grand Ethiopian Renaissance* (GERD)

Pada bab ini, penulis akan membahas sejarah dan awal mula pembangunan GERD serta beberapa peristiwa penting yang menyertai pembangunan dan dampak dari pembangunan *Grand Ethiopian Renaissance* Dam terhadap Mesir.

BAB III Kebijakan dan Diplomasi Mesir dalam Merespon Pembangunan *Grand Ethiopian Renaissance* (GERD)

Pada bab ini, Penulis akan memaparkan kebijakan-kebijakan dan strategi diplomasi yang dilakukan Mesir sejak awal GERD dibangun pada masa pemerintahan Muhamad Mursi dan Abdul Fatah As sisi.

BAB IV Faktor-faktor yang Menyebabkan Perubahan strategi Mesir dalam Merespon Pembangunan GERD

Pada bab ini, merupakan bab yang berisi tentang pembuktian hipotesa sehingga nantinya akan menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan perubahan strategi Mesir dalam Merespon Pembangunan GERD.

BAB V Kesimpulan

Pada bab ini, penulis akan menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis dan pembahasan.